BKP SDM KAB. NGANJUK

RENCANA KERJA

RENJA

TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN NGANJUK

LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

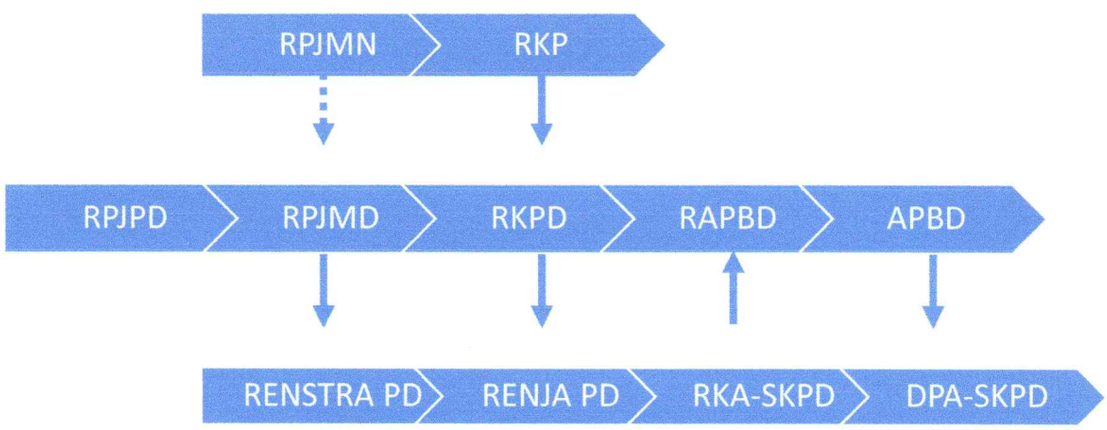
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-1 (Pertama) periode tahun 2024; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

II NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.2. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hasil Kritis yang terkait dengan Pelayanan Daerah;

2.3. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah;

2.5. Isu-Isu Penting dan Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan;

2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.....

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-	-	-	-			
1	01				KEPEGAWAIAN			-	-	-	-			
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BKPSDM		-	-	-	-	100		
1	01	01	01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun		-	-	-	-	10 dokumen		
5	03	01	2. 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	3 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	2 dokuen	-
5	03	01	2. 01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	-
5	03	01	2.	03	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%		-	

			01		Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%		-	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 laporan	-	4 dokumen	4 dokumen	100%		2 laporan	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan (sakip, pmprb)	-	**3 dokumen**	**3 dokumen**			1 laporan	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**78 laporan**	-	-	-	-	**76 dokumen**		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	-	24 dokumen	24 dokumen	100%	-	34 orang	-
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 dokumen	-	25 dokumen	25 dokumen	100%	-	12 dokumen	-

5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	-	12 dokumen	**12 dokumen**	100%	-	-	-
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	-
5	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerikasaaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen		1 laporan	1 laporan	100%		-	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	-	-	-
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan realisasi anggaran perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	-	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	-
5	03	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-			
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	1 laporan	-
5	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-	-	-	-			

5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 paket	-	105 buah	103 buah	98%	-	14 paket	-
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	84 paket		9750 buah	9547 buah	98%	-	45 paket	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24 paket		398 pax	389 pax	985		19 paket	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturanb perundang-undangan yang tersedia	24 dokumen		408 exemplar	384 exemplar	97%		8 dokumen	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100 laporan		200 buah	178 buah	89%		31 laporan	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporam		85 kali	75 kali	88%		29 laporan	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 dokumen	-	500 arsip	433 arsip	87%	-	154 dokumen	-
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	-	1 laporan	1 laporan	100%	--	-	-
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	30 unit	-	5 buah	5 buah	100%	5 buah	14 unit	-

						Disediakan									
5	**0 3**	**0 1**	**2. 0 8**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-				
5	03	01	2. 08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan surat menyurat	12 laporan	-	120 paket	110 paket	92%	-	-	-
5	03	01	2. 08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	36 paket	36 paket	100%	3 paket		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	-	-	-	--	-	18 laporan	-
5	03	01	2. 08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum	-	-	4 orang	4 orang	100%	4 orang	-	
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	-	-	-	-	-	4 laporan	-
5	**0 3**	**0 1**	**2. 0 9**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		-	-	-	-				
5	03	01	2. 09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dirawat	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	
						Jumlah kendaraan perorangan diasn atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	1 unit	-	-	--	-	-	--	-

						pajaknya									
5	03	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dirawat	-	-	8 unit	8 unit	100%	9 unit	-	
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	8 unit					-	8 unit	
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dirawat	-	-	10 buah	10 buah	100%	10 buah		
						Jumlah unit mebel yang dipelihara	10 unit	-	-	-	-	-	-	-
5	03	01	2.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dirawat	-	-	83 unit	81 unit	98%	83 unit	-	
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	30 unit						16 unit	
5	03	01	2.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan laiinya yang dirawat	-	-	2 gedung	2 gedung	100%	2 gedung	-	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	-	-	-	-	-	2 gedung	-
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Baik	-	-	-	-			
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah ASN yang update data kepegawaian, jumlah pelamar ASN , Jumlah ASN yang	8.571 orang	-	-	-	-			

						diberhentikan dan Jumlah Laporan Formasi								
5	03	02	2. 01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan asn	Jumlah Formasi yang disusun	-	-	50 laporan	50 laporan	100%	50 laporan	-	
						Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan , jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1 dokumen						50 laporan	
5	03	02	2. 01	04	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Jumlah pelamar CASN	-	-	-	-	-	700 pelamar	-	
						Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	03	02	2. 01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang diberhentikan dan ASN yang diberi hak pensiun	-	-	500 orang	500 orang	100%	500 orang	-	
						Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	600 dokumen	-	-	-	-	-	323 okumen	-
5	03	02	2. 01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang update data simas	-	-	8571 orang	8571 orang	100%	8.571 orang	-	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan system informasi kepegawaian	10 dokumen	-	-	-	-	-	**5 dokumen**	-
5	**03**	**02**	**2. 02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah ASN yang Mutasi, Promosi dan Naik Pangkat**	**3500 orang**	-	-	-	-			
5	03	02	2. 02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang mutasi	-	-	1000 orang	1233 orang	123%	100 orang	-	-

						Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutase jabatan, Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,Jabatan pelaksanan dan Mutasi ASN antar daerah	100 dokumen	-	-	-	-	-	181 dokumen	-
5	03	02	2. 02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang naik pangkat dan gaji berkala	-	-	3000 orang	3043 orang	101%	3000 orang	-	
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3000 dokumen	-	-	-	-	-	2363 dokumen	-
5	03	02	2. 02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang Promosi Jabatan	-	-	100 orang	85 orang	85%	100 orang	-	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi ASN	320 dokumen	-	-	-	-	-	166 dokumen	-
5	**03**	**02**	**2. 03**		**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03	02	2. 03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	-	-	150 orang	126 orang	84%	150 orang	-	
						Jumlah dokumen pengelolaan assesmnet center	120 dokumen	-	-	-	-	-	422 dokumen	-
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang ikut Pendidikan lanjutan	-	-	-	-	-	3 orang	-	-
						Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 orang	-	-	-	-	-	2 orang	-
5	03	02	2. 03	13	Pembinaan jabatan fungsional ASN	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	-	-	5 kali	5 kali	100%	5 kali	-	
						Jumlah ASN	500 orang						422 orang	

						Fungsional yang dibina									
5	03	02	2. 04		**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja , usul tanda jasa dan pembinaan pegawai	9591 orang	-	-	-	-	9246 orang		
5	03	02	2. 04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	-	-	8571 orang	8571 orang	100%	8571 orang	-	
						Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	8720 dokumen						1856 dokumen	
5	03	02	2. 04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang usul tanda jasa	-	-	500 orang	548 orang	110%	600 orang		
						Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	500 orang	-	-	-	-	-	223 orang	
5	03	02	2. 04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan disiplin	-	-	500 orang	858 orang	172%	500 orang	-	
						Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Disiplin	500 orang						5 orang	
5	03	02	2. 04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah ASN yang dilayani ijin perceraian	-	-	20 orang	19 orang	95%	20 orang	-	
						Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	25 dokumen						4 orang	
5	04				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			-	-	-	-			
5	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan	100%	-	-	-	-	100%		

5	04	02	2.01		**Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**	Jumlah ASN yang mendapat pengembangan kompetensi Teknis	600 orang	-	-	-	-	-	-	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang dikirim Diklat Teknis	-	--	748 orang	748 orang	100%	14 orang	-	
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 orang	-	-	-	-	--	68 orang	-
					Pembinaan, Pengordinasianm fasilitasi, pemantauan,Evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis, umu, inti dan pilihan bagi jabatan admnistrasi penyelenggara urusan pemerintahan, konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	52 dokumen	-	-	-	-	-	52 dokumen	-

						Pemerintahan Umum								
5	04	02	2.02		**Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah ASN yang mengikuti Manajerial dan Fungsional	-	-	-	-	-			
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota								
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang dikirim Diklat PIM dan Latsar		-	64 orang	89 orang	139%	5 orang	-	
						Jumlah ASN yang dikirim Diklat Latsar	-	-	-	-	-	544 orang	-	
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 laporan	-	-	-	-	2 laporan	1 laporan	-
					Program Pelayanan			-	-	-	-			

					Administrasi Perkantoran								
					Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jml jasa surat menyurat yang dilaksanakan	-	404 surat	250 surat menyurat	150 surat	60%		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jml jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	6 paket	3 paket	3 paket	100%		
					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	-	1560 buah	488 buah	450 buah	93%		
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	-	17023 lembar	10000 lembar	9500 lembar	95%		
					Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	-	188 buah	95 buah	80 buah	85%		
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	-	1000 koran	500 koran	500 koran	100%		
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	-	21605 gelas	12100 gelas	10890 gelas	90%		
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang dilaksanakan	-	154 kali	61 kali	61 kali	100%		
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring, kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	-	67 kali	11 kali	11 kali	100%		
					Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	Jumlah alat dan bahan pembersih yang tersedia	-	-	120 buah	111 buah	100%		
					Pengelolaan dan pendokumentasian arsip-arsip perangkat daerah	Jumlah Pengelolaan dan pendokumentasian arsip-arsip perangkat daerah	-	-	500 arsip	650 arsip	130%		
					Program Peningkatan Sarana		-						

					dan Prasarana Aparatur									
					Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung dan kantor	-		41 unit	41 unit	100%			
					Pengadaan perlengkapan Gedung/ kantor	Jumlah perlengkapan gedung/ kantor	-		0 unit	0 unit	100%			
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	-	7 unit	2 unit	2 unit	100%			
					Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor	Jumlah jasa Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor	-	24 kali	12 kali	12 kali	100%			
					Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung / kantor	Jumlah jasa Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung / kantor	-	71 kali	20 kali	20 kali	100%			
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Jumlah jasa Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	-	89 kali	12 kali	12 kali	100%			
					Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Jumlah jasa Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	-	60 kali	10 kali	10 kali	100%			
					Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	-		7 kendaraan	7 kendaraan	100%			
					Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-							
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jml laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	-	11 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%			
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jml laporan keuangan semesteran yang disampaikan tepat waktu	-	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jml laporan keuangan akhir tahun yang disampaikan tepat waktu	-	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
					Peningkatan kapasitas		-							

					sumber daya aparatur								
					Pengiriman diklat PIM	Jumlah pejabat struktural yang dikirim mengikuti diklat PIM	-	5 orang	-	-			
					Diklat PIM tingkat III	Jumlah eselon III yang mengikuti diklat PIM III	-	30 orang	-	-			
					Diklat PIM tingkat IV	Jumlah eselon IV yang mengikuti diklat PIM IV	-	40 orang	-	-			
					Diklat penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah	-	53 orang	-	-			
					Pendidikan Akhlaq Qur'ani bagi ASN	Jumlah ASN yg mengikuti Pendidikan Akhlaq Qur'ani	-	50 orang	-	-	-		
					Diklat peningkatan kapasitas kepala desa	Jumlah kepala desa yang mengikuti dikla	-	264 orang	-	-			
					Diklat Latihan Dasar bagi CPNS (Latsar)	Jumlah ASN yg mengikutiDiklat Latihan Dasar bagi CPNS (Latsar)	-	427 orang	140 orang	140 orang	100%		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian	Jumlah ASN yg mengikuti Sosiallisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	-		-	-	-		
					Pengiriman dan Fasilitasi Diklat Teknis Fungsional	Jumlah ASN yg mengikuti diklat teknisdan fungsional	-	98 orang	50 orang	33 orang	66%		
					Bimtek Penyusunan IP ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek penyusunan IP ASN	-	55 orang	-	-	-		
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
					Uji Kompetensi dan Talent Pool bagi ASN	Jumlah ASN yang ikut Uji Kompetensi dan Talent Pool	-		0 orang	0 orang			
					Pembinaan Karier Asn	Jumlah ASN yg ikut ujian dinas TK I dan II, penyesuaian ijazah, jumlah ASN yg dilantik dlm jabatan	-	1600 orang	500 orang	661 orang	133%		

						struktural maupun fungsional tertentu							
					Seleksi Penerimaan dan Pembekalan CASN	Jumlah peserta seleksi CASN dan jumlah CASN yg mendapat pembekalan	-	15735 pelamar	7000 pelamar formasi 2019 dan 3000 pelamar 2020	9030 orang	129%			
					Penataan System Kenaikan Pangkat	Jumlah ASN yg naik pangkat dan gaji berkala	-	7922 orang	4000 orang	4079 orang	102%			
					Penataan System Pensiun ASN	Jumlah ASN yg pensiun	-	-	500 orang	609 orang	122%			
					Penyusunan Formasi ASN	Jumlah laporan penyusunan formasi ASN	-	100 laporan	50 laporan	50 laporan	100%			
					Program Pengendalian dan Pembinaan Pegawai		-							
					Penerapan system Penilaian Kinerja PNS	Jumlah ASN yg mendapat penilaian kinerja	-		4000 orang	4000 orang	100%			
					Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yg update Data SIMAS	-	18373 orang	9534 orang	8571 orang	90%			
					Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN pembinaan disiplin ASN, pengambilan sumpah/ janji ASN , pemberhentian sementara ASN, pengaktifan ASN, pemberhentian sementara ASN yg melakukan tindak pidana, dan pelayanan ijin cerai, ijin cuti, karis/karsu, kartu pegawai, mencalonkan diri sbgai kades, penetapan tewas kecelakaan kerja,, kode etik ASN	-	14599 orang	500 orang	1410 orang	282%			
					Peningkatan Motivasi Kerja dan Pembinaan Mental Spiritual ASN	Jumlah peserta yg mendapat pembinaan mental spiritual	-		0 orang	0 orang				
					Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah ASN yg usul Satya Lencana	-	914 orang	400 orang	240 orang	60%			

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Kepegawaian Daerah	38,16%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	**Implikasi Terhadap Target Renstra PD**	**Kebijakan Yang Diambil**
Adanya OPD yang belum mengirimkan Data Penilaian SKP tahun 2022 sehingga BKPSDM tidak bisa melaksanakan rekonsiliasi data pada aplikasi SIASN.	Rendahnya Nilai Dimensi Kinerja pada IP ASN	• Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan rekonsialiasi data Kinerja ASN (SKP)
a. Data SAPK BKN dengan data Simpeg Instansi masih belum terintegrasikan, data pada aplikasi Simpeg belum	Rendahnya Nilai Dimensi Kompetensi pada IP ASN	• Melakukan Penyelenggaraan , Pengiriman dan Fasilitasi Diklat Teknis

seluruhnya terupdate dan belum lengkap terutama data terkait Pendidikan dan pelatihan yang sudah dilakukan oleh pegawai di masing-masing K/L/Pemda, hal ini salah satu faktor yang menyebabkan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sempat tertunda. b. Pengumpulan dan Validasi data terkait jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi masih dalam proses penghitungan (sementara). Data dari OPD belum seluruhnya terhimpun		• Pendidikan dan Latihan Dasar bagi CPNS (Latsar) Diklat Kepemimpinan dan Orientasi bagi PPPK • ASN Corporate University dari BPSDM Provinsi Jawa Timur melalui webinar yang bertajuk "ASN Belajar". • Mengintegrasikan Aplikasi SAPK BKN dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) • Melakukan Rekonsiliasi Data dengan seluruh OPD terkait ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi di secara berkala per Tribulan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan II

2.2. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan relatif tercapai dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan terus berupaya meningkatkan pelayanan-pelayanan dibidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk

memberikan pelayanan kepada Aparatur di setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, masyarakat dan penerima layanan lainnya, antara lain :

1. Pengadaan ASN;
2. Pemberhentian ASN
3. Fasilitasi lembaga profesi ASN
4. Informasi Kepegawaian
5. Mutasi ASN
6. Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala ASN
7. Promosi ASN
8. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
9. Tugas Belajar dan Ijin Belajar
10. Pengembangan Karier Jabatan Fungsional ASN
11. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
12. Pemberian penghargaan bagi Pegawai
13. Pembinaan Disiplin ASN
14. Proses ijin perceraian Pegawai
15. Pengembangan Kompetensi Teknis
16. Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional
17. Pemberian Reward and Punishment.

Pelayanan-pelayanan tersebut diatas diberikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang pada tahun 2022 sejumlah : 8.720 ASN dengan latar belakang pendidikan, jenis kelamin, pangkat golongan yang berbeda, selain pelayanan kepada ASN Badan Kepegawaian Daerah juga memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk terkait dengan informasi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara.

2.3. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelayanan kepegawaian antara lain :

1. Pengalokasian anggaran untuk Diklat pegawai sangat terbatas dimana hal ini mempengaruhi penilaian dimensi kompetensi Indeks Profesionalitas ASN
2. Penempatan ASN belum optimal, belum sesuai kompetensi dan kualifikasi jabatan di karenakan belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan
3. Penggunaan aplikasi e-kinerja belum optimal karena masih dalam proses pengembangan sehingga belum dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki

2.4. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada di Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan kegiatannya terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk antara lain :

1. Sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Nganjuk;
2. Adanya komitmen Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan pelayanan;
3. Adanya komitmen penegakan disiplin untuk penurunan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
4. Peningkatan pemberian reward and punishment.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelayanan kepegawaian, yaitu:

1. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Kabatan
2. Terbatasnya ketersediaan SDM Aparatur terutama jabatan fungsional yang terkait dengan tenaga IT, Asessor, dan analis kepegawaian;
3. Masih belum optimalnya budaya kerja pegawai terkait dengan tugas, tanggungjawab, etika dan perilaku pegawai;
4. Belum adanya penilaian kinerja yang obyektif dan pengukuran kompetensi untuk setiap jabatan sebagai basis penyusunan rencana diklat;
5. Pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian masih kurang;
6. Layanan administrasi kepegawaian belum seluruhnya terintegrasi;
7. Belum ditetapkannya anjab dan ABK oleh PPK sehingga penataan ASN belum bisa optimal ;
8. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Diklat.

2.5. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan kepegawaian, maka perlu adanya penentuan isu-isu strategis sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk.

Dari bermacam-macam jenis pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ada di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi seluruh Aparatur Sipil Negara untuk memberikan pelayanan yang prima dengan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan berbasis Tehnologi Informasi.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Manajemen ASN dilakukan berdasarkan system Merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan sehingga untuk mewujudkan hal tersebut tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kurangnya integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk, kurangnya kompetensi manajerial, penempatan Aparatur Sipil Negara belum sesuai kompetensi.

Dari faktor-faktor pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang harus ditangani secara berkesinambungan adalah :

1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di semua level jabatan baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional
2. Penyusunan key performance indikator (indikator kinerja) untuk setiap jabatan ASN
3. Penyusunan kelompok suksesi untuk jabatan yang lowong melalui manajemen talent pool
4. Peningkatan Kompetensi ASN yang didasarkan pada gap kompetensi dan gap kinerja
5. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Kepegawaian

Program Kepegawaian Daerah dengan Kegiatan antara lain :

- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- Mutasi dan Promosi ASN
- Pengembangan Kompetensi ASN

- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kegiatan antara lain :

- Pengembangan Kompetensi Teknis
- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan berpedoman pada Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tahap ke IV RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025, kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 tahun. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

"Nganjuk Akuntabel".

Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 3 : Meningkatkan profesionalitas ASN Indikator Sasaran : Indeks Profesionalitas ASN

Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 Nomor 7 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov). Fokus pada prioritas ini, peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan berdedikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, 687 kolusi dan nepotisme (open and clean government), meningkatkan tata kelola pemerintahan (good governance) dan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (e-gov) serta peningkatan kualitas SDM ASN

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviuw tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
5	03	01			Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nganjuk	Nilai SAKIP BKPSDM	80,5		Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nganjuk	Nilai SAKIP BKPSDM	80,5		Mendukung Renstra	
5	03	01	201		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	16 dokumen	31.465.000	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	16 dokumen	31.465.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nganjuk	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	201	02	Koordinasi dan	Nganjuk	Jumlah Dokumen	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi	Nganjuk	Jumlah	2 dokumen	2.000.000	Mendukung	

					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Renstra	
5	03	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nganjuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nganjuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	Mendukung Renstra	
5	**03**	**01**	**202**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**4 dokumen**	**4.711.998.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**4 dokumen**	**4.711.998.000**	**Mendukung Renstra**	
5	03	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	39 orang/bulan	4.900.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	39 orang/bulan	4.513.450.852	Mendukung Renstra	

							Tunjangan ASN			ASN		Tunjangan ASN				
5	03	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nganjuk	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 dokumen	5.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nganjuk	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 dokumen	2.500.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10 .000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.500.000	Mendukung Renstra	
5	**03**	**01**	**203**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**Nganjuk**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**1 dokumen**	**5.000.000**	**Kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**Nganjuk**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada**	**1 dokumen**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada**	**Mendukung Renstra**	

					Daerah		**yang disusun**			**Daerah**		**perangkat daerah yang disusun**		**perangkat daerah yang disusun**		
5	03	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	Mendukung Renstra	
5	**03**	**01**	**205**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun**	**3 dokumen**	**173.810.100**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun**	**3 dokumen**	**173.810.100**	**Mendukung Renstra**	
5	03	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	40 Orang	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	40 Orang	150.000.000	**Mendukung Renstra**	
5	03	01	205	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Nganjuk	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	2 Paket	11.000.000	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Nganjuk	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	2 Paket	11.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	205	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	40 orang	162.810.100	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	40 orang	162.810.100	Mendukung renstra	

							perundang-undangan					perundang-undangan				
5	**03**	**01**	**206**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**253.990.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**253.990.500**	**Mendukung Renstra**	
5	03	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 Paket	4.996.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nganjuk	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 Paket	4.996.900	Mendukung Renstra	
5	03	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nganjuk	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	200 Paket	65.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nganjuk	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	200 Paket	65.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	200 Paket	49.996.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	200 Paket	49.996.100	Mendukung Renstra	
5	03	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nganjuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	411 Dokumen	7.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nganjuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	411 Dokumen	7.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	206	07	Fasilitasi Kunjungan	Nganjuk	Jumlah Laporan Fasilitasi	100 Laporan	9.997.500	Fasilitasi Kunjungan	Nganjuk	Fasilitasi Kunjungan	100 Laporan	9.997.500	Mendukung Renstra	

					Tamu		Kunjungan Tamu			Tamu		Tamu				
5	03	01	206	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	110.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	110.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	206	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nganjuk	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nganjuk	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	5.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	206	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Mendukung Renstra	
5	**03**	**01**	**207**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**30 unit**	**124.776.000**	**Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**30 unit**	**124.776.000**	**Mendukung Renstra**	
5	03	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nganjuk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	124.776.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nganjuk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	124.776.000	Mendukung Renstra	

5	**03**	**01**	**208**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**3 laporan**	**253.635.000**	**Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**3 laporan**	**253.635.000**	**Mendukung Renstra**	
5	03	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	186.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	186.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	65.635.000	Mendukung Renstra	
5	**03**	**01**	**209**		**Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara**	**1 laporan**	**396.987.550**	**Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nganjuk**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara**	**1 laporan**	**396.987.550**	**Mendukung Renstra**	

5	03	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	100.000.000	Kegiatan enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nganjuk	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	99.989.700	Mendukung Renstra	
5	03	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nganjuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nganjuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	161.998.700	Mendukung Renstra	
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Nganjuk	Jumlah Unit Mebel yang dipelihara	10 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Nganjuk	Jumlah Unit Mebel yang dipelihara	10 unit	5.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nganjuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nganjuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	50.000.000	Mendukung Renstra	
5	03	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Nganjuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	80.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Nganjuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	79.999.150	Mendukung Renstra	

					Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi				
5	***03***	***02***			***PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH***	***Nganjuk***	***1.Persentase ASN dengan predikat kinerja pegawai minimal baik*** ***2. Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Pendidikan*** ***3. Persentase pemenuhan Formasi jabatan structural*** ***4. Persentase Nilai Ujian Kompetensi Minimal cukup optiman***	***99%*** ***55%*** ***75%*** ***75%***	***2.965.142.500***	***PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH***	***Nganjuk***	***1.Persentase ASN dengan predikat kinerja pegawai minimal baik*** ***2. Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Pendidikan*** ***3. Persentase pemenuhan Formasi jabatan structural*** ***4. Persentase Nilai Ujian Kompetensi Minimal cukup optiman***	***99%*** ***55%*** ***75%*** ***75%***	***2.965.142.500***	***Mendukung RPJMD***	
5	**03**	**02**	**201**		**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Nganjuk**	**Jumlah Laporan pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**1 lapor**	**450.000.000**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Nganjuk**	**Jumlah Laporan pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**1 lapor**	**450.000.000**	**Mendukung RPJMD**	
5	03	02	201	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	150.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan	1 Dokumen	100.000.000	**Mendukung RPJMD**	

										ASN		Kebijakan Pengadaan ASN				
5	03	02	201	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	50 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	50 Dokumen	75.000.000	Mendukung RPJMD	
5	03	02	201	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	100.000.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	100.000.000	Mendukung RPJMD	
5	03	02	201	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	600 Dokumen	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	600 Dokumen	50.000.000	Mendukung RPJMD	
5	03	02	201	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 dokumen	75.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 dokumen	75.000.000	Mendukung RPJMD	
5	**03**	**02**	**202**		**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Nganjuk**	**Jumlah laporan Mutasi dan Promosi**	**1 laporan**	**650.000.000**	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Nganjuk**	**Jumlah laporan Mutasi dan Promosi**	**1 laporan**	**650.000.000**	Mendukung RPJMD	
5	03	20	01	03	Pengelolaan	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	100	200.000.000	Pengelolaan	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil	100 Dokumen	100.000.000	Mendukung RPJMD	

		2			Mutasi ASN		Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		Mutasi ASN		Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				
5	03	202	02	03	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Nganjuk	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3000 Dokumen	250.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Nganjuk	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3000 Dokumen	230.000.000	Mendukung RPJMD	
5	03	202	03	03	Pengelolaan Promosi ASN	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	500 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	500 Dokumen	320.000.000	Mendukung RPJMD	
5	**03**	**02**	**203**		**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	Nganjuk	**Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN**	**1 Laporan**	**1.125.000.000**	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	Nganjuk	**Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN**	**1 Laporan**	**1.125.000.000**	**Mendukung RPJMD**	
5	03	02	203	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Surabaya, Yogyakarta	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 orang	400.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Surabaya, Yogyakarta	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 orang	350.000.000	Mendukung RPJMD	
5	03	02	203	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Nganjuk	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitasi Sertifikati Jabatan	300 orang	800.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Nganjuk	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitasi Sertifikati Jabatan	300 orang	600.000.000		

5	03	02	203	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifkasi Jabatan ASN	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifkasi Jabatan ASN	1 Laporan	50.000.000		
5	03	02	203	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional	Nganjuk	Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan FUngsionla ASN	300 orang	75.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional	Nganjuk	Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan FUngsionla ASN	300 orang	75.000.000		
5	03	02	203	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 dokumen	50.000.000	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Nganjuk	2 dokumen	300 orang	50.000.000		
5	**03**	**02**	**204**		**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Nganjuk**	**Jumlah Laporan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**1 Laporan**	**740.142.500**	**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Nganjuk**	**Jumlah Laporan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**1 Laporan**	**740.142.500**	**Mendukung RPJMD**	
5	03	02	204	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	170.000.000		
5	03	02	204	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	8.456 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	8.456 Dokumen	125.000.000	Mendukung RPJMD	

					Aparatur		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Kinerja Aparatur		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
5	03	02	204	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	1 dokumen	100.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	1 dokumen	130.000.000		
5	03	02	204	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Nganjuk	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	175 orang	50.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Nganjuk	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	175 orang	30.000.000	Mendukung RPJMD	
5	03	02	204	07	Pembinaan Disiplin ASN	Nganjuk	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 orang	80.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Nganjuk	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 orang	255.000.000	Mendukung RPJMD	
5	03	02	204	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Nganjuk	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	50.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Nganjuk	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	30.142.500	Mendukung RPJMD	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Nganjuk**	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun**	**70%**	**1.960.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Nganjuk**	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun**	**70%**	**1.960.000.000**	**Mendukung RPJMD**	
5	**04**	**02**	**201**		**Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Nganjuk**	**Jumlah ASN yang mendapat pengembangan kompetensi**	**90 orang**	**420.000.000**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Nganjuk**	**Jumlah ASN yang mendapat pengembangan kompetensi**	**90 orang**	**420.000.000**	**Mendukung RPJMD**	

							teknis					**teknis**				
5	04	02	201	03	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 orang	500.000.000	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penyusunan HPS dan Hukum Kontrak, DIklat Revolusi Mental, Diklat Msnajemen Kinerja Pegawai, Diklat Perencanaan bagi OPD, Diklat Mitigasi Bencana, Diklat Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Diklat TOT Pengelolaan Keuangan Desa, Diklat Dasar Pol PP, Diklat Kearsipan, DIklat Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi Pendamping Desa dan Pengiriman Diklat Teknis	150 orang	340.000.000	Mendukung RPJMD	

					Pembinaan, Pengooordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	52 Dokumen	100.000.000	Pembinaan, Pengooordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Nganjuk	Jumlah Pembinaan, Pengooordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	52 Dokumen	80.000.000	Mendukung RPJMD	
5	**04**	**02**	**202**		**Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Nganjuk**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Fungsional dan manajerial**	**4500 orang**	**1.540.000.000**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Nganjuk**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Fungsional dan manajerial**	**4500 orang**	**1.540.000.000**	**Mendukung RPJMD**	

5	03	02	202	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nganjuk	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nganjuk	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup Kabupaten/Kota	6 Orang	100.000.000	Mendukung RPJMD	
5	04	02	202	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Nganjuk, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	2.000.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Nganjuk, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	1.440.000.000	Mendukung RPJMD	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

1.0. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Kepegawaian Daerah				
1	Pengelolaan Pendidikan lanjutan	Surabaya	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan lanjutan	2 orang	Tugas Belajar
II.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
1	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.	Nganjuk	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	108 orang	Diklat Penatausahaan Keuangan (54 Orang) Diklat Digitalisasi Laporan Kepegawaian (20 orang dari kecamatan)
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Surabaya dan Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Orang	Diklat Prabatan Eselon II (PKN)

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.1.1. Tujuan

Dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, BKPSDM Kabupaten Nganjuk mendukung tujuan pembangunan daerah **"Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik"** dan sasaran pembangunan daerah **"Meningkatkan profesionalitas ASN"**

Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan sejahtera Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk berupaya menyelenggarakan pelayanan manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah tujuan yang hendak dicapai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk selama 3 (lima) tahun kedepan. yaitu : **"MENINGKATNYA PROFESIONALITAS ASN"** indikator yang ditetapkan adalah Indeks Profesionalitas ASN. Guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Pada konteks performa ASN, perlu dilakukan upaya dan langkah yang sistematis serta signifikan dalam membangun integritas dan profesionalitas ASN. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat profesionalisme ASN dibutuhkan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengolahan instrumen tersebut menghasilkan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN

berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan yang ditranformasikan ke dalam bentuk indeks profesionalitas.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan ASN yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Target Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi. Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. Koheren; Kriteria yang digunakan sebagai standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bersumber dari sistem merit.
b. Kelayakan; Standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN.
c. Akuntabel; Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya.
d. Dapat ditiru; dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya.
e. Multi-Dimensional. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari beberapa dimensi.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Dimensi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dibuat sebagaimana berikut :

1. Dimensi Kualifikasi

   Digunakan untuk mengukur data mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah dan memiliki bobot nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh pengukuran, dengan indikator pada setiap dimensi memiliki bobot penilaian sebagai berikut:

   a. bobot nilai sebesar 25 (dua puiuh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Strata Tiga (S3),

   b. bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/rnemiliki pendidikan Strata Dua (S2);

   c. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh,/memiliki pendidikan Strata Satu (S1/Diploma Empat (D4);

   d. bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Dipioma Tiga (D3);

   e. bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidrkan Diploma Dua (D2)/Diploma Satu (D1)/SLTA/sederajat; dan

   f. bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA

2. Dimensi kompetensi

   Digunakan untuk mengukur data mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan dan memiliki bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh pengukuran, terdiri atas indikator sebagai berikut:

   a. lnstrumen pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan

(2) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;

b. lnstrumen pengukuran pada diklat Fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan

(2) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki

c. lnstrumen pengukuran pada diklat Teknis bobot penilaiannya sebagai berikut:

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis minimal 20 Jam Pelajaran (JP) yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;

(2) bobot nilar sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis minimal 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;

(3) bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis minimal 20 JP

yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;

(4) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis minimal 20 JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. lnstrumen pengukuran pada seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya bobot penilaiannya sebagai berikut:

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

(2) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional yang belum mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

(3) bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ selenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

(4) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir Keikutsertaan dalam seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas/dan sejenisnya.

3. Dimensi Kinerja

Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi ini memiliki bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran, terdiri atas indikator sebagai berikut:

a. bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik;

b. bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik;

c. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup;

d. bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang; dan

e. bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang;

f. Hasil penilaian kinerja yang dimaksudkan tersebut dihitung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.

4. Dimensi Disiplin

Digunakan untuk mengukur data kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, serta memiliki bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) terdiri atas indikator sebagai berikut:

a. bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dljatuhi hukuan disiplin;

b. bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;

c. bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan

d. bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

3.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk disusun berdasarkan indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN berdasar Sistem Merit

   Indikator yang ditetapkan dari sasaran ini adalah Nilai Sistem Merit. Substansi sasaran ini untuk melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan menerapkan prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.

   Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam manajemen ASN bertujuan Untuk :

   1. Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah

2. Mendorong terwujudnya ASN yang Profesional, berintegritas, sejahtera dan berperan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah negara yang efektif, efisien , terbuka, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi , kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan public yang berkualitas bagi masyarakat.

Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN yang diInstansi Pemerintah dilakukan berdasarkan aspek berikut :

a. Nilai Aspek Pengadaan dalam Indeks Sistem Merit

Digunakan untuk mengukur data mengenai proses pengadaan ASN dan memiliki bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh pengukuran

b. Nilai Aspek Pengembangan Karir dalam Indeks Ssistem Merit.

Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai pelaksanaan system pengembangan karir dan memiliki bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

c. Nilai Aspek Promosi dan mutasi dalam Indeks Sistem Merit

Digunakan untuk mengukur data yang terkait proses mutasi dan promosi, dan memiliki bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh pengukuran.

e. Nilai Aspek Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit

Digunakan untuk mengukur data penilaian kinerja dan tindak lanjutnya dalam manajemen ASN, Aspek ini memiliki bobot penilaian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan pengukuran.

f. Nilai Aspek Penghargaan, Penggajian dan Disiplin

Digunakan untuk mengukur data terkait pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman yang didasarkan pada kinerja ASN. Aspek ini memiliki bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) daroi keseluruhan pengukuran.

g. Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan

Digunakan untuk mengukur data yang terkait dengan perlindungan dan pelayanan yang diberikan kepada ASN. Aspek ini memiliki bobot penilaian sebesar 4% (empat persen) dari keseluruhan pengukuran

h. Nilai Aspek Sistem Informasi

Digunakan untuk mengukur data yang terkait dengan system informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh ASN. Aspek ini memiliki bobot penilaian sebesar 6% (enam persen) dari keseluruhan pengukuran.

2. Meningkatkan Kompetensi ASN

Indikator yang ditetapkan dari sasaran ini adalah Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN). Seperti yang telah disampaikan pada indikator tujuan diatas, Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

a. Diklat Kepemimpinan;
b. Diklat Fungsional;
c. Diklat Teknis; dan
d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

Adapun pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi adalah demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi ASN bisa membantu negara untuk membentuk tatanan negara yang lebih maju dan mensejahterakan masyarakatnya.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	55
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2024**
Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN berdasar Sistem Merit	Nilai Sistem Merit	250
Meningkatkan Kompetensi ASN	Nilai Dimensi Kompetensi	17

3.2. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan yang merupakan Program/kegiatan/sub kegiatan rutin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sedangkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 2 Program, 6 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut: (Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah-SIPD)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. NGANJUK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**10.878.804.650,00**							**13.774.841.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.878.804.650,00**							**13.774.841.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**8.918.804.650,00**							**11.535.366.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***	**81.5 Nilai 0 Nilai**			**80.5 Nilai**	**5.953.662.150,00**						**81 Nilai 0 Nilai**	**6.825.366.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun*	-			16 dokumen	31.465.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM	-	60.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	11.465.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Perencanaan Ahli Muda		31/1/23
2.	Kabid Pendataan		31/1/23
3	Kabid PPM		31/1/23
4.			
5.			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun*	-			4 Dokumen	4.711.998.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM	-	4.996.966.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	4.693.998.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		4.970.966.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	4.693.998.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		4.970.966.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	4.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun*	-			1 Dokumen	7.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM	-	12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun*	-			1 Dokumen	173.810.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM	-	288.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	11.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		8.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	162.810.100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		280.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah*	-			1 laporan	253.990.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM	-	389.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	4.996.900,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				200 Paket	65.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				200 Paket	49.996.100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				411 Dokumen	7.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	9.997.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	110.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah barang milik daerah yang diadakan*	-			30 unit	124.776.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM	-	250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	124.776.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia*	-			3 Laporan	253.635.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM	-	383.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	186.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		286.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	65.635.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara*	-			1 Laporan	396.987.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM	-	445.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	99.989.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	161.998.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	79.999.150,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase ASN dengan predikat kinerja pegawai minimal baik*** ***Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Pendidikan*** ***Persentase pemenuhan formasi Jabatan struktural*** ***Persentase Nilai Ujian Kompetensi Minimal Cukup Optimal***	**57 %** **99 %** **80 %** **85 %**			**99 %** **55 %** **75 %** **75 %**	**2.965.142.500,00**						**56 %** **99 %** **77 %** **80 %**	**4.710.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	-			1 laporan	450.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN	-	1.175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				50 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				500 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				4 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi*	-			1 laporan	650.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN	-	900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				100 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2000 Dokumen	230.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				500 Dokumen	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN*	-			1 Laporan	1.125.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN	-	1.725.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				4 Orang	350.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		425.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				150 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				300 Orang	75.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	-			1 Laporan	740.142.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN	-	910.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				8456 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	130.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				175 Orang	30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				250 Orang	255.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		280.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				20 Dokumen	30.142.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	ASN		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1.960.000.000,00**							**2.239.475.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP/tahun***	**80 %**			**70 %**	**1.960.000.000,00**						**75 %**	**2.239.475.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah ASN yang mendapat pengembangan kompetensi teknis*	-			90 Orang	420.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM	-	532.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				150 Orang	340.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		432.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				52 Dokumen	80.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Fungsional dan Manajerial*	-			4500 Orang	1.540.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM	-	1.706.725.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				40 Orang	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Laporan	1.440.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	BKPSDM		1.586.725.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	JUMLAH							**10.878.804.650,00**							**13.774.841.000,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Unsur Penunjang urusan pemerintahan.

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2024)
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Tugas Belajar)	350.000.000
2	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN (Assesment jabatan Administrasi)	600.000.000
3	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Penyusunan Key performance Indicator)	170.000.000
4	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Penyusunan Gap Kinerja)	130.000.000
5	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Penyusunan Gap Kompetensi ASN)	100.000.000

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2024)	Alokasi (2024)
1	Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN berdasar Sistem Merit	Nilai Sistem Merit	250	Rp. 8.918.804.650,00
2	Meningkatkan Kompetensi ASN	Nilai Dimensi Kompetensi	17	Rp. 1.960.000.000,00
	Total			Rp. 10.878.804.650,00

Tabel 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BKPSDM	80.5	**5.953.662.150**
1.1	**Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun**	**2 dokumen**	**31.465.000**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	11,465,000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5,000,000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	5,000,000
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	10,000,000
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**4 dokumen**	**4.711.998.000**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	4.693.998.000
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 dokumen	4,000,000
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	6,000,000
1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	8,000,000
1.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun**	**1 dokumen**	**7,000,000**
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	7,000,000
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**1 dokumen**	**173.810.100**
1.4.1	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	31 paket	11,000,000
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	162,810,100
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi umum perangkat daerah**	**1 laporan**	**253.990.500**
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 Paket	4.996.900
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	200 Paket	65,000,000

1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	200 Paket	49.996.100
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	411 Dokumen	7.000.000
1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	9.997.500
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	110,000,000
1.5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	5,000,000
1.5.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	2,000,000
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**30 unit**	**124,776.000**
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	124.776.000
1.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa penunjang Urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**3 laporan**	**253.635.000**
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	2,000,000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	186,000,000
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	65.635.000
1.8	**Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara**	**1 laporan**	**398.987.550**
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	99.989.700
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	161.998.700
1.8.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	5,000,000
1.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	50,000,000
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	79.999.150
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Jabatan Struktural yang terisi**	**100%**	**2.965.142.500**
2.1	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah laporan pengadaan pemberhentian dan Informasi kepegawaian**	**1 laporan**	**450,000,000**
2.1.1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	150,000,000
2.1.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	50 Dokumen	75,000,000
2.1.3	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 laporan	100,000,000

2.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	500 Dokumen	50,000,000
2.1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 dokumen	75,000,000
2.2	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah ASN yang mutasi, promosi dan naik pangkat**	**3500 orang**	**650.000.000**
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 Dokumen	100,000,000
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3000 Dokumen	230,000,000
2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	500 Dokumen	320,000,000
2.3	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengkuti pengembangan kompetensi**	**1 Laporan**	**1,125,000,000**
2.3.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 orang	350,000,000
2.3.2	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapat Layanan fasilitasi Sertifikasi Jabatan	150 orang	600,000,000
2.3.3	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	50,000,000
2.3.4	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	300 Orang	75,000,000
2.3.5	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	50,000,000
2.4	**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja**	**8.580 orang**	**740.142.500**
2.4.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	170,000,000
2.4.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8456 Dokumen	125,000,000
2.4.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	130,000,000
2.4.4	Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	175 Orang	30,000,000
2.4.5	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	250 Orang	255,000,000
2.4.6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses izin Perceraian Pegawai yang dilayani	20 Dokumen	30,142.500
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Prosentase ASN yang mengikuti diklat**	**100%**	**1,960,000,000**
3.1	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN yang mendapat pengembangan kompetensi teknis**	**90 orang**	**420,000,000**
3.1.1	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 orang	340,000,000

3.1.2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	52 dokumen	80,000,000
3.2	**Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim dan Latsar**	**4500 orang**	**1,540,000,000**
3.2.1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	40 orang	100,000,000
3.2.2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM, Latsar dan diklat fungsional	3 Laporan	1,440,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2024 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan
3. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Nomor : 050/ 430.2 /411.404/2023

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusunan agenda kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.	✓			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi	✓			

	pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai Surat Edaran Bupati.	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah.	✓			
13.	Pendanaan dan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah telah disahkan.	✓			

Nganjuk, 27 Juni 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN NGANJUK

Drs.ADAM MUHARTO, AP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19730511 199311 1 002